



**Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)**  
**Volume 7 (2): 142-162, November (2020)**  
**Website <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jppm/index>**  
**Email: [jurnal\\_pls@fkip.unsri.ac.id](mailto:jurnal_pls@fkip.unsri.ac.id)**  
**(p-ISSN: 2355-7370) (e-ISSN: 2685-1628)**



naskah diterima: 09/11/2020, direvisi: 30/11/2020, disetujui: 30/11/2020

## **PROBLEMATIKA PENERIMA MANFAAT PADA KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA DI KELURAHAN UMBAN SARI KECAMATAN RUMBAL PEKANBARU**

**Ria Rizkia Alvi, Dafetta Fitrilinda, Fajri Muharram, Anggoro**

*Universitas Riau*

[ariarizkia@yahoo.com](mailto:ariarizkia@yahoo.com), [dafettafitrilinda@lecturer.unri.ac.id](mailto:dafettafitrilinda@lecturer.unri.ac.id), [Fajrimandiri5@gmail.com](mailto:Fajrimandiri5@gmail.com),  
[anggoropiko22@gmail.com](mailto:anggoropiko22@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penerima manfaat pada kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan evaluasi Model CIPP terdiri dari konteks, masukan, proses, dan produk. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumen, dan observasi. Subjek penelitian ini adalah koordinator wilayah, lurah, pendamping, fasilitator dan penerima manfaat. Teknik keabsahan data dilakukan triangulasi, diskusi dengan ahli, dan perpanjangan pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa problematika penerima manfaat pada pelatihan diantaranya tidak terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial pada penerima manfaat, tidak ada perluasan kesempatan kerja, dan penerima manfaat belum memiliki kemampuan mengelola usaha setelah pelatihan. Program PMB-RW ini harus memiliki program pendampingan/ pembinaan setelah pelatihan selesai, perlunya penyesuaian dana atau penambahan biaya dengan kebutuhan program yang diperuntukkan bagi pelatihan PMB-RW sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang dibuat. Pihak Kelurahan perlu menambahkan direncanakan kegiatan anggaran pengusulan dana pendampingan/ pembinaan, rekrutmen penerima manfaat secara bergulir agar semua warga dapat mengikuti pelatihan. Ke depan Kelurahan harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang baik agar peserta yang mengikuti pelatihan merasa nyaman selama pelatihan berlangsung.

**Kata kunci:** Problematika, Penerima Manfaat, PMB-RW

**Abstract:** This study aims to determine the problems of beneficiaries in community empowerment training activities based on community groups in Umban Sari Village, Rumbai District, Pekanbaru. This study used a qualitative approach with an evaluation of the CIPP Model consisting of context, input, process, and product. Data collection techniques using interviews, documents, and observations. The subjects of this study were the regional coordinators, village heads, assistants, facilitators and beneficiaries. The data validity technique was performed by triangulation, discussion with experts, and extension of observations. The data analysis technique used in this research is qualitative data analysis, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that there were several problems with the training recipients, including the absence of an increase in the recipient's economic and social welfare, the absence of expansion of employment opportunities, and the absence of the ability to manage a business after the training. The PMB-RW program must have a mentoring / coaching program after the training is completed, it is necessary to adjust funds or additional costs with the program needs for PMB-RW training so that its implementation can take place according to the plan that

*has been made. The Kelurahan needs to add that planned budget activities for proposing funds for assistance / guidance, recruitment of beneficiaries on a rolling basis so that all residents can attend training. In the future, the Kelurahan must have good training facilities and infrastructure so that participants who take part in the training feel comfortable during the training.*

**Keywords:** *Problematics, Beneficiaries, PMB-RW*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang merupakan penghasil minyak dengan kualitas minyak terbaik dunia adalah Duri, dibawah nama besar Chevron, pada bulan November 2006, ladang minyak Duri telah mencapai rekor produksi 2 miliar barrel sejak pertama kali dipompa pada tahun 1958 (Ayu, 2015). Memiliki cadangan Migas terbesar di Asia Tenggara, sepatutnya masyarakat yang bertempat tinggal di Negeri Lancang Kuning ini bisa hidup sejahtera, namun faktanya, angka kemiskinan Riau masih tinggi meskipun mengalami penurunan persentase kemiskinan per provinsi Sumatera. Berdasarkan data BPS Pusat, 2020, secara keseluruhan per provinsi di Sumatera, tingkat kemiskinan di Bengkulu menjadi yang tertinggi dengan persentase 15,03 persen. Provinsi kedua yaitu Aceh dengan persentase 14,99 persen. Provinsi ketiga yaitu Sumatera Selatan dengan persentase 12,66 persen. Dalam data BPS disebutkan, ada tiga provinsi di Sumatera yang mengalami penurunan persentase kemiskinan pada Maret lalu yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Riau.

Salah satu program pemerintah yang mengantisipasi masalah kemiskinan yaitu dengan menyelenggarakan program pendidikan/pelatihan kecakapan hidup atau *life skill* (Miradj & Sumarno, 2014). Program-program keterampilan tersebut biasanya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat, baik dalam perekonomian maupun sosial. Peningkatan ekonomi masyarakat juga harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu pemerintah kota Pekanbaru membuat kebijakan dengan menerapkan program pemberdayaan yang disebut Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB–RW) Kota Pekanbaru.

Program ini berbentuk pelatihan bagi kelompok masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia. Flippo (Kamil, 2012, p.3) mengemukakan bahwa “*training is the act increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job*”.

Pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan tugas tertentu. Hal senada ditambahkan oleh Beach (Kamil, 2012, p.10) yaitu *“The objective of training is to achieve a change in the behavior of those training”*. Tujuan pelatihan adalah untuk memperoleh perubahan dalam tingkah laku mereka yang terlatih. Burke & Day (1986) mengungkapkan pelatihan positif mempengaruhi kinerja manajer kemudian Bartel (1991) investasi dalam pelatihan meningkatkan produktivitas, lalu McIvor, Humphreys, & McAleer (1997) berpendapat bahwa pelatihan memengaruhi komitmen organisasi, pengetahuan peserta dan organisasi berbasis harga diri. Kegiatan pelatihan dapat terjadi apabila seseorang atau masyarakat menyadari perlunya mengembangkan potensi dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepuasan hidupnya. Oleh sebab itu, diperlukan kegiatan pemberdayaan.

Tujuan program PMB-RW adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan program PMB RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Sesuai dengan Peraturan walikota Nomor 44 Tahun 2014 maka program PMB RW mulai dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2014, akan tetapi pada Kecamatan Rumbai Pesisir baru adanya pengukuhan tenaga pendamping program PMB-RW pada Maret 2015. Sesuai dengan peraturan Walikota maka program PMB-RW ini mempunyai pelaksanaan yang jelas agar meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan sosial kaum miskin, memperluas kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan kapasitas lokal. Rukun Warga (RW) yang menjadi sasaran program PMB-RW adalah Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Kelurahan Umban Sari untuk kegiatan PMB-RW tahun anggaran 2018 dilaksanakan secara swakelola yang terdiri atas kegiatan pelatihan yaitu pelatihan

hidroponik, pelatihan perbengkelan sepeda motor, pelatihan posyandu, pelatihan perbengkelan las, pelatihan service AC, dan pelatihan tata boga, sedangkan kegiatan pekerjaan konstruksi (fisik), yaitu pembuatan drainase yang tersebar di berbagai RW kelurahan Umban Sari. Kegiatan PMB-RW tahun anggaran 2019, yaitu pelatihan tata boga ada 45 peserta dengan melibatkan 11 RW dan biogas ada 5 peserta dengan melibatkan 1 RW serta semenisasi jalan untuk pekerjaan fisik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan penerima manfaat ada beberapa problematika pelatihan PMB-RW bahwa pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru belum memperlihatkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan keterampilan masyarakat. Penerima manfaat belum mengoptimalkan keterampilan yang diperoleh pasca pelatihan seperti belum mampu menganalisa peluang usaha akibatnya banyak masyarakat yang tidak mau mengambil resiko untuk membuka usaha mandiri maupun bersama. Tidak ada keberlanjutan dan pembinaan/ pendampingan yang dilakukan oleh pengelola program pasca pelatihan PMB-RW. Suatu program dikatakan berhasil jika ada keberlanjutan dari hasil program tersebut. Kemampuan atau keterampilan yang dimiliki pasca pelatihan juga tidak bisa dilaksanakan sebagai mata pencaharian karena tidak memiliki modal. Menurut Wesa & Suryono (2014) pelatihan tidak bermanfaat jika peserta tidak mendapatkan kemampuan atau motivasi untuk mendapatkan keuntungan darinya.

Dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat tahap keberlanjutan adalah hal penting untuk dilakukan agar keterampilan yang diperoleh dapat langsung diterapkan untuk membuka peluang usaha sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disini letak peran fasilitator dan pengelola program untuk melakukan pembinaan/ pendampingan pelatihan akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mengatakan bahwa pihak kelurahan tidak bisa melakukan pembinaan karena dana tidak ada, dana yang dikelola hanya untuk kegiatan pelatihan bukan untuk pembinaan/pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ditemukan permasalahan yaitu dana yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan atau pengusulan dari kelurahan karena pihak pemerintah sudah menetapkan anggaran yang sama untuk semua kelurahan. Kendalanya berada pada kelurahan dengan jumlah

warga terbanyak tetapi dana yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan pelatihan. Sedangkan kelurahan dengan jumlah warga terkecil harus mencari atau menambah kegiatan diluar usulan sesuai dengan anggaran yang telah diberikan. Akibatnya kelurahan dengan jumlah warga terbanyak harus mencari cara agar semua pelatihan yang disetujui bisa dilaksanakan dengan dana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah kota. Kegiatan tidak lagi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dana menjadi tidak tepat sasaran sementara kelurahan harus melaporkan hasil kegiatan berupa laporan pertanggungjawaban.

Problematika tersebut menunjukkan bahwa misi dari kebijakan yang baik tidak selalu sesuai harapan. Program pemerintah yang belum tepat sasaran yaitu rekrutmen masyarakat yang mengikuti pelatihan hanya bertumpuk pada kalangan tertentu, dana yang tidak sesuai kebutuhan, dan dalam menentukan kebutuhan pelatihan tidak mengkaji secara mendalam siapa yang dilatih, tujuan pelatihan, untuk kebutuhan siapa pelatihan itu dilakukan, siapa penyelenggara pelatihan, dan merupakan paket yang tak dapat dipecah-pecah sesuai dengan keinginan pembelajar (*teacher-controlled*), ataukah dapat dipilih materinya oleh pembelajar sendiri (*learner-controlled*) (Mujiman, 2011: 58). Ini menunjukkan bahwa perlu ada penanganan secara komprehensif dan terpadu, bersinergi dan berkelanjutan.

Ketidaktampakan hasil peningkatan mutu pembelajaran pasca pelatihan merupakan isu strategis yang berkembang berkaitan dengan evaluasi keberhasilan pelatihan. Hal ini cukup memperhatikan karena selama ini yang dilakukan hanyalah sebatas evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi dampak pelatihan tidak menjadi prioritas dan tidak menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan dan pengembangan program pelatihan. Hal ini menjadi salah satu penyebab program PMB-RW memiliki manfaat tetapi belum berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat yang mengikutinya. Hamblin (1974) mendefinisikan evaluasi pelatihan sebagai upaya apapun untuk mendapatkan informasi (umpan balik) tentang efek program pelatihan dan untuk menilai nilai pelatihan dalam terang informasi bahwa untuk meningkatkan pelatihan lebih lanjut.

Berdasarkan studi literatur di atas maka dapat dirumuskan bahwa pelatihan PMB-RW memiliki daya tarik tersendiri sehingga membuat masyarakat khususnya ibu-

ibu usia produktif memilih program tersebut sebagai sarana pengembangan diri atau sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu dikaji lebih mendalam agar tujuan dari PMB-RW tercapai. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “problematika penerima manfaat pada kegiatan pelatihan PMB-RW di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan evaluasi Model CIPP dari Stufflebeam (1985) yang terdiri dari konteks, masukan, proses, dan produk. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumen, dan observasi. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah koordinator wilayah, lurah, pendamping dari Kelurahan Umban Sari, fasilitator dan penerima manfaat. Teknik keabsahan data dilakukan triangulasi, diskusi dengan ahli, dan perpanjangan pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif (Miles & Huberman, 2007) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Desain penelitian dari problematika penerima manfaat pada kegiatan pelatihan PMB-RW dengan indikator menggunakan model CIPP dari Stufflebeam (1985) yang terdiri dari:

- 1) Evaluasi konteks, terdiri dari sub indikator kelembagaan PMB-RW, visi dan misi kelembagaan, latar belakang, tujuan dan kurikulum pelatihan.
- 2) Evaluasi masukan terdiri dari sub indikator kesiapan penerima manfaat, kesiapan instruktur, kesiapan penyelenggara, metode dan materi pelatihan, sarana prasarana, sumber dana dan sosialisasi
- 3) Evaluasi proses terdiri dari sub indikator pemahaman materi, performa fasilitator dan pelaksanaan pelatihan
- 4) Evaluasi produk terdiri dari sub indikator kompetensi penerima manfaat dan dampak pelatihan

**Tabel 1. Desain penelitian problematika penerima manfaat pada pelatihan PMB-RW di Umban Sari**

Indikator	Sub Indikator	Alat pengumpul Data			Sumber data	Interpretasi
Konteks	1. Identitas program PMB-RW				Arsip	Terpenuhi 1: Tidak Baik Terpenuhi 2: Kurang Baik Terpenuhi 3: Baik Terpenuhi 4: Sangat Baik
	2. Visi dan Misi PMB-RW				Arsip	
	3. Latar belakang program pelatihan				Lurah dan Koordinator Wilayah	
	4. Tujuan program pelatihan				Fasilitator, Penerima manfaat, Pendamping, dan Koordinator Wilayah	
	5. Kurikulum program pelatihan				Koordinator Wilayah dan Kurikulum Tahun 2019	
Input	1. Kesiapan penerima manfaat				Fasilitator dan Penerima manfaat Biodata dan daftar hadir penerima manfaat	Terpenuhi 1: Tidak Baik Terpenuhi 2: Kurang Baik Terpenuhi 3: Baik Terpenuhi 4: Sangat Baik
	2. Kesiapan fasilitator				Penerima manfaat Daftar riwayat hidup dan daftar hadir fasilitator	
	3. Kesiapan penyelenggara				Koordinator Wilayah, pendamping dan fasilitator	
	4. Materi pelatihan				Fasilitator dan modul pelatihan	
	5. Metode pelatihan				Fasilitator dan penerima manfaat	
	6. Sarana dan peralatan pendukung				Penerima manfaat	
	7. Sumber dana				Lurah dan Koordinator Wilayah	
	8. Sosialisasi pelatihan				Koordinator Wilayah dan Pendamping	
Proses	1. Pemahaman materi				Fasilitator dan Penerima Manfaat	Terpenuhi 1: Tidak Baik Terpenuhi 2: Kurang Baik Terpenuhi 3: Baik Terpenuhi 4: Sangat Baik
	2. Performa fasilitator				Penerima manfaat	
	3. Pelaksanaan pelatihan				Fasilitator	

Indikator	Sub Indikator	Alat pengumpul Data			Sumber data	Interpretasi
Produk	1. Kompetensi penerima manfaat				Lurah, Fasilitator, Pendamping dan Penerima Manfaat	Terpenuhi 1: Tidak Baik Terpenuhi 2: Kurang Baik Terpenuhi 3: Baik Terpenuhi 4: Sangat Baik
	2. Dampak pelatihan				Lurah, Koordinator Wilayah, Pendamping dan Penerima Manfaat	

*Sumber: Model Evaluasi CIPP dari Stufflebeam, 1985*

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data kualitatif digunakan untuk menampilkan data hasil dari observasi dan wawancara. Data kualitatif peneliti tampilkan dalam bentuk teks naratif. Problematika penerima manfaat pada kegiatan pelatihan PMB-RW dengan indikator menggunakan model CIPP dari Stufflebeam (1985) yang terdiri dari:

**Tabel 2. Hasil Penelitian Problematika Penerima Manfaat pada Pelatihan PMB-RW**

Indikator	Sub Indikator	Ringkasan Penelitian	Pedoman Evaluasi	Interpretasi
Konteks	1. Kelembagaan	Legalitas program PMB-RW Kota Pekanbaru yaitu organisasi pelaksana PMB-RW yaitu Tim Koordinasi Kota, Tim Koordinasi Kecamatan, Tim Fasilitator, dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW). Masing-masing tim memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.	Peraturan Walikota Pekanbaru No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.	Baik
	2. Visi dan misi	Visi PMB-RW adalah	Visi dan Misi	Baik

Indikator	Sub Indikator	Ringkasan Penelitian	Pedoman Evaluasi	Interpretasi
	program	<p>mewujudkan masyarakat Kota Pekanbaru yang madani dimulai dari Rukun Warga</p> <p>Misi PMB-RW adalah</p> <p>2.1 Bahwa untuk melaksanakan suatu program harus memiliki perencanaan yang didukung dengan data-data eksisting dimasing-masing RW meliputi peta rona, data demografi dan rencana penataan kawasan (RPK-RW)</p> <p>2.2 Hasil proses pelaksanaan dari Tridaya (Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Penataan Lingkungan) diharapkan terbentuk masyarakat Madani.</p>	<p>Kelembagaan merujuk pada Peraturan Walikota Pekanbaru No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.</p>	
	3. Latar belakang program pelatihan	<p>Selama ini banyak produk-produk hukum dan kearifan lokal yang ada masih merupakan <i>Tacit Knowledge</i> bagi pimpinan/lembaga tertentu yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga gagasan Walikota Pekanbaru yang dituangkan dalam</p>	<p>Latar belakang dari program PMB-RW adalah merujuk pada Peraturan Walikota Pekanbaru No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program</p>	Baik

Indikator	Sub Indikator	Ringkasan Penelitian	Pedoman Evaluasi	Interpretasi
		<p>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangkauannya cukup jauh kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah/lembaga lain di Kota Pekanbaru harus mengambil langkah agar <i>Tacit Knowledge</i> tidak hanya difahami oleh pimpinan/lembaga dilevel-level tertentu, maka Pemerintah memberi peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikut sertakan peran masyarakat di level Rukun Warga dari <i>Tacit Knowledge</i> menjadi <i>Explicit Knowledge</i> yang berperan sebagai media komunikasi pembangunan, artinya RPJMD perlu diterjemahkan kedalam bentuk program melalui pendekatan Pemberdayaan bersama-sama masyarakat Kota Pekanbaru.</p> <p>Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat lokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat dilevel RW/RT masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru</p>	

Indikator	Sub Indikator	Ringkasan Penelitian	Pedoman Evaluasi	Interpretasi
		pemberdayaan yang ada di tingkat kelurahan, solusi yang ditawarkan melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru.		
	4. Tujuan program pelatihan	4.1 Menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian 4.2 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru 4.3 Menciptakan kemandirian masyarakat 4.4 Menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri.	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal.	Baik
	5. Kurikulum program pelatihan	Belum ada pedoman kurikulum yang dijadikan acuan dalam membuat program PMB-RW	Belum ada pedoman kurikulum	Kurang Baik
	Interpretasi			Baik
Input	1. Kesiapan penerima manfaat	Karakteristik penerima manfaat yang mengikuti kegiatan ini yakni mulai usia remaja dan usia produktif sehingga sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan. Dengan adanya berbagai karakteristik penerima manfaat, secara tidak langsung membuat penerima manfaat mampu mengatasi	Kelengkapan administrasi penerima manfaat dan pelaksanaan kegiatan pelatihan PMB-RW	Baik

<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Ringkasan Penelitian</b>	<b>Pedoman Evaluasi</b>	<b>Interpretasi</b>
		perbedaan tersebut dengan melakukan kegiatan bersama sehingga tercipta kerjasama dan kreativitas penerima manfaat pada masing-masing kelompok		
	2. Kesiapan instruktur	Instruktur sudah menyiapkan semaksimal mungkin agar kompetensi masing masing penerima manfaat ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi lingkungan setempat. Untuk kesiapan instruktur sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan tupoksi dari instruktur.	Kelengkapan administrasi instruktur dan pelaksanaan kegiatan pelatihan PMB-RW	Baik
	3. Kesiapan Penyelenggara	Kesiapan penyelenggara diawali dengan adanya SK serta surat Kerjasama dari Walikota dan Kelurahan. Pada program PMB-RW, pelaksanaan pelatihan dimulai dari seleksi penerima manfaat pelatihan hingga pelaksanaan uji pelatihan atau evaluasi	Pedoman pada Peraturan Walikota Pekanbaru No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.	Baik
	4. Metode pelatihan	Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah pendekatan orang dewasa, pemandu berperan mendorong proses diskusi, berbagi pengalaman,	Metode pelatihan tersebut membantu pemahaman penerima manfaat tentang materi yang disampaikan dan metode yang	Baik

<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Ringkasan Penelitian</b>	<b>Pedoman Evaluasi</b>	<b>Interpretasi</b>
		melakukan refleksi serta mengintruksikan pengalaman peserta.	digunakan bervariasi dan sesuai dengan materi pelatihan yakni ceramah, diskusi, dan demonstrasi pada saat pelatihan.  Pedoman laporan pertanggungjawaban	
	5. Sarana dan peralatan pendukung	Kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan rapi, terawat dan bersih yang disediakan oleh penyelenggara.  Kondisi sarana dan prasarana penunjang pelatihan lengkap dan pelaksanaan pelatihan dilakukan diruang yang cukup luas. Tetapi sarana pelatihan belum dijadikan sebagai inventaris dikarenakan sarana prasarana bersifat kontrak.	Berjalannya suatu program kegiatan yang dilaksanakan	Kurang Baik
	6. Sumber dana	Sumber dana dari APBD Kota Pekanbaru	Dana operasional penyelenggaraan pelatihan PMB-RW tahun 2019 dibebankan kepada APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi Riau maupun APBN, Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan Sumber dana	Baik

Indikator	Sub Indikator	Ringkasan Penelitian	Pedoman Evaluasi	Interpretasi
			lainnya yang sah dan tidak mengikat. Dana tersebut digunakan untuk bahan praktik, penguatan kapasitas, kegiatan dan insentif pelaksana kegiatan PMB-RW.	
	7. Sosialisasi program	Sosialisasi dilakukan oleh pihak penyelenggara pada Februari 2018	Prosedur Sosialisasi merujuk pada Peraturan Walikota Pekanbaru No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.	Baik
	Interpretasi			Baik
Proses	1. Pemahaman materi	Proses <i>transfer knowledge</i> yang dilakukan oleh instruktur dengan cara menjelaskan tujuan pelatihan dan kompetensi yang harus dicapai. Kendala yang dihadapi adalah faktor usia penerima manfaat yang beragam ada yang muda juga ada yang sudah tua dan tingkat pendidikan yang beragam mulai SMP sampai S1, hal ini sangat berpengaruh dalam	Dengan media pembelajaran yang kreatif dapat membantu penerima manfaat memahami materi pelatihan dan materi yang disampaikan oleh instruktur sangat mudah dipahami oleh penerima manfaat	Baik

<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Ringkasan Penelitian</b>	<b>Pedoman Evaluasi</b>	<b>Interpretasi</b>
		memahami materi dan berinteraksi selama pelatihan		
	2. Performa fasilitator	Proses interaksi yang terjalin antara penerima manfaat dan instruktur membuat penerima manfaat menjadi aktif selama kegiatan berlangsung.	Perfoma instruktur sudah sesuai dengan kompetensi/ bidangnya	Baik
	3. Pelaksanaan Pelatihan	Pelaksanaan pelatihan sudah berjalan sesuai dengan tahapan pelaksanaan program, jadwal dan susunan acara yang sudah dibuat. Waktu pelatihan yang terbatas karena biaya pelatihan yang terbatas. Dengan demikian, kegiatan sudah berjalan dengan kondusif.	Berjalannya suatu program kegiatan yang dilaksanakan	Baik
	Interpretasi			Baik
Produk	1. Kompetensi peserta	Pengetahuan dan keterampilan selama mengikuti pelatihan PMB-RW	Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan dapat dikatakan baik walaupun tidak berdampak banyak, namun ada hal positif yang dapat diambil oleh masyarakat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.  Terjadi perubahan – perubahan dalam masyarakat, baik perubahan secara pribadi maupun	Kurang Baik

Indikator	Sub Indikator	Ringkasan Penelitian	Pedoman Evaluasi	Interpretasi
			kelompok, dan perubahan dalam sikap, keterampilan dan pengetahuan.	
	2. Dampak pelatihan	Kesejahteraan ekonomi, sosial dan perluasan kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat.	Tidak membawa dampak dalam kehidupan pasca mengikuti pelatihan PMB-RW.	Kurang Baik
	Interpretasi			Kurang Baik

(Sumber: Data Primer dan Data Sekunder diolah, Tahun 2020)

Hasil evaluasi problematika penerima manfaat pelatihan PMB-RW menunjukkan hasil yang belum baik artinya masih ada beberapa masalah yang muncul pada pelatihan PMB-RW di Kelurahan Umban Sari. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terhadap aspek pada masing-masing indikator yang belum optimal dan belum mencapai target yang diinginkan.

### **Evaluasi konteks**

Terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru selama ini banyak produk-produk hukum dan kearifan lokal yang ada masih merupakan *Tacit Knowledge* bagi pimpinan/lembaga tertentu yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga gagasan Walikota Pekanbaru yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangkauannya cukup jauh kepada masyarakat Pemerintah memberi peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikut sertakan peran masyarakat di level Rukun Warga dari *Tacit Knowledge* menjadi *Explicit Knowledge* yang berperan sebagai media komunikasi pembangunan, artinya RPJMD perlu diterjemahkan kedalam bentuk program melalui pendekatan Pemberdayaan bersama-sama masyarakat Kota Pekanbaru. Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat lokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat dilevel RW/RT masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan yang ada di tingkat kelurahan, solusi yang ditawarkan melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

menciptakan kemandirian masyarakat dan menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri. Di tingkat Kelurahan program diusulkan.

Pelaksanaan pelatihan bagi penerima manfaat belum memiliki kurikulum terstruktur. Kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan dan sasaran yang di inginkan. Seharusnya kurikulum sangat penting dalam penyelenggaraan pelatihan atau program karena merupakan acuan/ standar yang digunakan untuk mengukur kompetensi peserta pelatihan. Kurikulum yang diterapkan sebaiknya kurikulum yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perumusan kurikulum dan tujuan pelatihan tidak melibatkan penerima manfaat. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum disusun melalui perumusan tujuan pembelajaran, penentuan pengalaman belajar yang harus disediakan untuk mencapai tujuan, pengorganisasian pengalaman belajar secara efisien dan efektif, serta penetapan kriteria untuk menilai pencapaian tujuan. Sehubungan dengan itu para penyelenggara dan pelaksana pelatihan, termasuk tutor, pelatih, widyaiswara, perlu memahami dan memiliki kemampuan untuk merancang kurikulum pelatihan. Apabila kurikulum tidak sesuai atau bahkan tidak ada maka standar kompetensi yang diharapkan tidak tercapai sehingga pelatihan menjadi tidak bermakna.

### **Evaluasi Input**

Dalam menetapkan calon penerima manfaat saat proses pelatihan ada beberapa pertimbangan. Homogenitas latar belakang penerima manfaat seperti usia dan latar belakang pendidikan sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelatihan. Penerima manfaat memiliki latar belakang pendidikan usia yang heterogen. Dengan latar belakang pendidikan yang kurang seragam tersebut, waktu yang dibutuhkan masing-masing penerima manfaat untuk memahami suatu materi pelatihan akan berbeda dan berinteraksi selama pelatihan. Perbedaan usia yang cukup signifikan ini juga merupakan faktor yang dapat menghambat tingkat pemahaman peserta terhadap suatu materi pelatihan. Kesiapan instruktur sebagai penyampai materi pelatihan juga sangat mempengaruhi kelancaran proses pelatihan. Instruktur memberikan materi pelatihan

disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat dan berasal dari Kelurahan Umban Sari telah memiliki pengetahuan maupun keterampilan khusus yang memadai. Suatu pelatihan akan efektif, efisien dan bermanfaat apabila dikelola secara profesional. Dari sisi pengelolaan pelatihan dapat dikategorikan baik. Namun tidak adanya batasan usia maksimal dalam penentuan pendaftar perlu dipertimbangkan lagi. Pengelolaan dana penyelenggaraan pelatihan bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang pengeluarannya digunakan untuk keperluan pembelian bahan pelatihan, pemeliharaan alat, sarana dan prasarana serta untuk biaya administrasi namun sarana prasarana penunjang pelatihan masih sangat terbatas, belum memadai, dan seadanya.

Rata-rata penerima manfaat yang mengikuti pelatihan memiliki motivasi sangat tinggi, sebab pelatihan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan serta membangkitkan semangat usaha dari masing-masing penerima manfaat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah pendekatan orang dewasa, pemandu berperan mendorong proses diskusi, berbagi pengalaman, melakukan refleksi serta menginstruksikan pengalaman peserta. Dengan bantuan dari Kelurahan sosialisasi dilakukan terkait pelatihan PMB-RW dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti pelatihan PMB-RW bagi penerima manfaat.

### **Evaluasi Proses**

Pelatihan dilaksanakan oleh Kelurahan Umban Sari bagi rukun warga dalam bentuk Diklat yang dilaksanakan secara bersamaan. Dengan tujuan agar peserta yang mengikuti pelatihan memiliki kesungguhan dalam mengikuti diklat sehingga mereka dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga tidak ada kurikulum yang terstruktur dalam pelatihan. Waktu pelatihan terbatas karena disesuaikan dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Secara keseluruhan pelaksanaan pelatihan dapat dikategorikan baik.

### **Evaluasi Produk**

Keberhasilan pelaksanaan pelatihan dapat dilihat dengan adanya perubahan perekonomian penerima manfaat setelah mengikuti pelatihan. Pelatihan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) tetapi penerima manfaat belum mampu

melihat peluang usaha yang ada setelah mengikuti pelatihan seperti pada saat Lurah memberikan tantangan kepada penerima manfaat untuk membuatkan pesanan kue dan akan dijual ke publik, maka jawaban dari penerima manfaat adalah menolak dengan alasan tidak cukup berani untuk mengambil resiko ketika akan membuka usaha mandiri. Sisi lain juga belum terjawab adalah ketika pelatihan selesai dilaksanakan maka perancang program harus melakukan rencana tindak lanjut, pembinaan atau pendampingan pasca pelatihan agar pelatihan tersebut berdampak langsung ke penerima manfaat baik secara ekonomi, sosial dan perluasan kesempatan kerja.

Berhasil atau tidaknya sebuah pelatihan dipengaruhi oleh proses sebelum dan sesudah dilaksanakannya pelatihan, selama pelaksanaan hingga sesudah pelatihan dilaksanakan. Dengan demikian, langkah awal dalam proses pelaksanaan pelatihan yaitu analisis kebutuhan pelatihan merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi pertama terhadap efektivitas pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan belum dilakukan oleh penyelenggara pelatihan yang menyebabkan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan perluasan kerja. Disamping itu, evaluasi dampak pelatihan tidak menjadi prioritas dan tidak menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan dan pengembangan program pelatihan. Evaluasi yang dilakukan masih merupakan kegiatan pelengkap dalam suatu kerangka program pelatihan, belum dimasukkan sebagai bahan untuk memperbaiki mutu dan relevansi pelatihan yang diselenggarakan. Hal ini berdampak pada pengembangan program pelatihan yang kurang bermakna. Dampak pelatihan bagi penerima manfaat yang telah mengikuti pelatihan diantaranya tidak terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial pada penerima manfaat, tidak ada perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, dan belum ada yang memiliki kemampuan mengelola usaha setelah pelatihan. Secara keseluruhan dampak pelatihan dapat dikategorikan tidak baik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Konteks dalam pelatihan PMB-RW dibentuk dari berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat lokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat dilevel RW/RT masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan

yang ada di tingkat kelurahan, solusi yang ditawarkan melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru, memiliki tujuan dan sasaran tetapi belum memiliki kurikulum terstruktur. (2) Input dalam pelatihan PMB-RW dilaksanakan sesuai dengan kesiapan penerima manfaat dan instruktur, dengan bantuan dari Kelurahan sosialisasi dilakukan tentang pelatihan PMB-RW, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti pelatihan PMB-RW, sumber dana dari APBD pemerintah Kota Pekanbaru namun sarana prasarana belum memadai, materi dan metode sesuai dengan kebutuhan. (3) Proses dalam pelatihan PMB-RW dilaksanakan dalam bentuk diklat, instruktur memiliki kompetensi yang memadai, dalam penerimaan materi faktor usia penerima manfaat yang beragam ada yang muda juga ada yang sudah tua dan tingkat pendidikan yang beragam mulai SMP sampai S1, hal ini sangat berpengaruh dalam memahami materi dan berinteraksi selama pelatihan. (4) Produk dalam pelatihan PMB-RW menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan kompetensi penerima manfaat meningkat tetapi penerima manfaat belum ada yang memiliki kemampuan mengelola usaha setelah pelatihan sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan ekonomi, sosial dan perluasan kesempatan kerja.

Perhatian pemerintah Kota Pekanbaru kepada program PMB-RW agar berdampak pada kesejahteraan ekonomi, sosial dan perluasan kesempatan kerja penerima manfaat yakni memiliki program pendampingan/ pembinaan setelah program dilakukan, perlunya penyesuaian dana atau penambahan biaya dengan kebutuhan program yang diperuntukkan bagi pelatihan PMB-RW sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang dibuat. Pihak Kelurahan Umban Sari perlu menambahkan pada rencana kegiatan anggaran untuk mengusulkan dana pendampingan/ pembinaan setelah pelatihan, rekrutmen penerima manfaat sebaiknya dilakukan secara bergulir agar semua warga dapat mengikuti pelatihan PMB-RW yang menjadi program andalan Kota Pekanbaru. Ke depan Kelurahan harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang baik agar peserta yang mengikuti pelatihan merasa nyaman selama pelatihan berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bartel, A. P. (1991). *Productivity Gains From The Implementation Of Employee Training Programs*. Cambridge, MA. <https://doi.org/10.3386/w3893>
- Burke, M. J., & Day, R. R. (1986). A Cumulative Study of the Effectiveness of Managerial Training. *Journal of Applied Psychology*, 71(2), 232–245. <https://doi.org/10.1037/00219010.71.2.232>
- Ema, Evi (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Universitas Islam Riau. 5(2). PP. 156-163. e-ISSN : 2622-934X p-ISSN : 2502-9757
- Evi, Ema (2018). Implementasi program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Wedana*. Universitas Islam Riau. IV(2). PP. 568-580
- Hamblin, A. C. (1974). *Evaluation and Control of Training*. McGraw-Hill.
- Kamil, Mustofa. (2012). *Model pendidikan dan pelatihan: konsep dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok, Soebiato Poerwoko. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Halmahera Barat. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(1), 101– 112. <https://doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2360>
- McIvor, R., Humphreys, P., & McAleer, E. (1997). The Evolution of the Purchasing Function. *Strategic Change*, 6(3), 165– 179. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)10991697\(199705\)6:3<165::AIDJSC247>3.0.CO;2-6](https://doi.org/10.1002/(SICI)10991697(199705)6:3<165::AIDJSC247>3.0.CO;2-6)
- Mujiman, Haris. (2011). *Manajemen pelatihan berbasis belajar mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru.
- Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru
- Stufflebeam, D. (2001). Evaluation Models. *New Directions for Evaluation*, 2001(89), 7–98
- Wesa, A., & Suryono, Y. (2014). Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Peserta Pelatihan Kelompok Prakoperasi di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(2), 149. <https://doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2685>